

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Best Practice program pendidikan gratis sudah memenuhi kriteria dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan dan transferabilitas. Adapun Faktor-faktor pendukung program Pendidikan gratis mengacu pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi program Pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan secara umum telah berjalan dengan baik dan efektif.

Dari aspek dampak, Program Pendidikan Gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga prasejahtera. Pemenuhan kebutuhan pendidikan secara menyeluruh membuat siswa lebih fokus belajar sehingga berdampak pada peningkatan motivasi, prestasi akademik dan non-akademik, serta pengembangan karakter dan keterampilan. Program ini turut mendukung peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat dikategorikan sebagai praktik baik (best practice) dalam kebijakan pendidikan.

Dari aspek kemitraan, pelaksanaan program melibatkan sinergi berbagai stakeholder, seperti pemerintah daerah, sekolah, akademisi, lembaga keuangan, BUMN, dan sektor swasta yang memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan, pembiayaan, fasilitas, serta program pengembangan siswa.

Kejelasan peran dan koordinasi yang berkelanjutan antar pihak membuat pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi tersebut, kemitraan tidak hanya memperkuat implementasi kebijakan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan kapasitas siswa.

Dari aspek keberlanjutan program, didukung oleh dua faktor utama, yaitu dukungan legislasi yang kuat dari pemerintah daerah serta pengembangan program yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pihak sekolah. Dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah menjadikan program ini sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan akses pendidikan.

Dari aspek kepemimpinan, komitmen pimpinan daerah yang konsisten dalam mendukung program pendidikan gratis menunjukkan adanya dukungan kebijakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan. Di tingkat sekolah, kepemimpinan yang bersifat delegatif dan transformasional mampu mendorong pengelolaan program secara terstruktur, partisipatif, dan efektif melalui pemberdayaan sumber daya manusia serta koordinasi yang baik antar komponen sekolah.

Dari aspek transferabilitas, program Pendidikan Gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan menunjukkan tingkat transferabilitas yang tinggi karena praktik pelaksanaannya telah menjadi rujukan bagi berbagai institusi pendidikan dan lembaga pemerintah. Hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan studi banding, penelitian, serta kunjungan dari sekolah dan instansi lain yang ingin mempelajari implementasi program tersebut.

Dari aspek komunikasi, kebijakan pendidikan gratis telah disosialisasikan secara jelas dan konsisten kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal sekolah maupun eksternal. Informasi kebijakan disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi formal sehingga dapat dipahami dengan baik oleh pelaksana kebijakan. Kejelasan, transmisi, dan konsistensi informasi tersebut mendukung keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan program pendidikan gratis.

Dari aspek sumber daya, SMA Negeri Sumatera Selatan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi tinggi, baik dari unsur pimpinan, tenaga pendidik, maupun tenaga kependidikan. Dukungan anggaran dari APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi faktor utama keberlangsungan program pendidikan gratis. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk fasilitas pembelajaran dan asrama, serta kejelasan wewenang dalam pengelolaan sekolah, turut memperkuat efektivitas implementasi kebijakan.

Dari aspek disposisi, sikap dan komitmen aparatur sekolah menunjukkan dukungan yang sangat kuat terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru memiliki kemauan yang tinggi untuk menjalankan kebijakan secara konsisten dan bertanggung jawab. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program, khususnya pada proses seleksi peserta didik dan pengelolaan keuangan, memperkuat kepercayaan publik dan pemerintah terhadap keberlanjutan program.

Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, implementasi kebijakan pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan didukung oleh struktur

organisasi yang jelas, keberadaan *Standar Operasional Prosedur* (SOP), serta program-program pendukung yang terintegrasi. Pembagian peran dan kewenangan antarunit birokrasi serta koordinasi antara Dinas Pendidikan, pihak sekolah, dan pemangku kepentingan eksternal berjalan secara efektif. Fragmentasi kewenangan yang dikelola dengan baik justru memperkuat sinergi antaraktor dalam pelaksanaan kebijakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat faktor implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi saling mendukung dan berkontribusi positif terhadap keberhasilan program pendidikan gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan. Program ini tidak hanya meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, tetapi juga mampu menjaga mutu pendidikan secara berkelanjutan, sehingga berperan sebagai instrumen strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan.

## **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Best Practice* pada Keberhasilan Program Pendidikan Gratis di SMA Negeri Sumatera Selatan, meskipun sudah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan. Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

### **1. Komunikasi**

Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas komunikasi kebijakan, khususnya dalam hal pemanfaatan media

digital dan forum komunikasi partisipatif, agar informasi kebijakan dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan secara lebih luas dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, disarankan agar komunikasi tidak hanya bersifat satu arah dan administratif, tetapi juga lebih partisipatif dan adaptif. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan perlu memperkuat mekanisme umpan balik (*feedback*) dari pihak sekolah, terutama terkait kendala teknis di lapangan, agar informasi yang diterima tidak hanya bersifat laporan formal, tetapi juga mencerminkan kondisi empiris pelaksanaan program.

## **2. Sumber Daya**

Pemerintah provinsi diharapkan dapat menjaga keberlanjutan dukungan anggaran serta meningkatkan investasi pada pengembangan kompetensi sumber daya manusia, khususnya melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, koordinasi antara Dinas Pendidikan dan pihak sekolah dalam perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana perlu terus diperkuat agar alokasi anggaran semakin responsif terhadap kebutuhan riil sekolah.

## **3. Disposisi**

Sekolah perlu terus menjaga konsistensi dalam menerapkan mekanisme seleksi peserta didik yang objektif, transparan, dan

akuntabel, termasuk melalui pelaksanaan seleksi berlapis dan *home visit*.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi yang telah berjalan efektif perlu terus disempurnakan melalui evaluasi SOP secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika kebijakan pendidikan. Koordinasi antarunit birokrasi serta dengan pemangku kepentingan eksternal juga perlu ditingkatkan guna memperkuat sinergi dan keberlanjutan program pendidikan gratis.